

BAB 2

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2017 hlm 57-58) pemberdayaan (*empowerment*) secara berasal dari kata “*power*” yang memiliki arti kekuasaan atau pemberdayaan. Oleh karena itu, ide dasar dari pemberdayaan tentu berkaitan dengan konsep kekuasaan. Selain itu pemberdayaan juga merupakan suatu proses perubahan dan memiliki istilah yang bermakna.

Pemberdayaan yaitu proses untuk memberdayakan pihak yang lemah (yang membutuhkan pemberdayaan). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses memberdayakan masyarakat agar masyarakat dapat dapat memenuhi segala kebutuhannya secara mandiri.

Menurut Suharto (2017 hlm 58) Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan berbagai keputusan yang mempengaruhi mereka.

Berdasarkan kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pembangunan yang dilakukan supaya dapat memberdayakan masyarakat lemah untuk menggapai tujuannya yaitu agar mampu membuat perubahan sosial dari perspektif ekonomi, sosial, dan budaya.

Kata pemberdayaan tentunya sering dikaitkan dengan konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan berkembang dengan hadirnya individu/masyarakat yang tidak berdaya baik dalam segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dengan adanya pemberdayaan ini maka dapat memberikan kekuasaan atau kemampuan individu untuk dapat mengembangkan dirinya agar dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Secara lebih spesifik dalam Anwas (2019 hlm 49-50) Slamet menekankan bahwa esensi pemberdayaan adalah membuat masyarakat mampu mandiri dalam segala hal. Istilah mampu disini memiliki arti : berdaya, paham, mampu mengambil kesempatan, serta mampu membuat keputusan, dan mampu mengambil resiko.

Dalam pelaksanaannya pemberdayaan memiliki arti dorongan/motivasi, dan bimbingan/dukungan dalam memandirikan masyarakat. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan pemberdayaan tergantung pada partisipasi /pemberdayaan yang dilaksanakan oleh individu atau masyarakat.

2.1.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto dalam Muchlisin (2017) ada enam tujuan dari adanya pemberdayaan masyarakat diantaranya : (a) Peningkatan kelembagaan, (b) peningkatan usaha, (c) peningkatan pendapatan, (d) perbaikan lingkungan, (e) peningkatan kehidupan, dan (f) peningkatan sosial.

Menurut Sulistiyani dalam Choironi (2018 hlm 30) tujuan pemberdayaan adalah terbentuknya kemandirian individu dan masyarakat. Kemandirian ini datang dalam bentuk kemandirian dalam pikiran dan tindakan, serta mampu mengontrol apa yang mereka lakukan.

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk membantu memberdayakan masyarakat supaya masyarakat tersebut dapat memenuhi segala kebutuhannya secara mandiri. Serta memberikan berbagai kemampuan kepada masyarakat, baik dalam segi ilmu pengetahuan, ekonomi, maupun sosial sehingga mereka mampu berperan dalam pengembangan masyarakat.

Menurut Suharto (2017 hlm 60) tujuan utama pemberdayaan memiliki tujuan utama yaitu memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya masyarakat lemah yang tidak berdaya, baik karena kondisi internal (misalnya kesadaran diri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya struktur sosial yang tidak adil). Berikut ini adalah kelompok-kelompok yang dapat dikategorikan kedalam kelompok lemah atau tidak berdaya, seperti kelompok yang kelas sosialnya

rendah, kelompok dengan sikap yang berbeda dengan dalam masyarakat, lanjut usia dan cacat (penyandang disabilitas), serta orang yang mengalami ketidakberdayaan. Mereka seringkali kurang dihargai bahkan disebut sebagai orang yang malas dan lemah. Padahal ketidakberdayaan yang mereka alami terkadang merupakan sebuah akibat dari diskriminasi dalam bidang kehidupan tertentu.

Menurut Fahrudin dalam Muchlisin (2017) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberdayaan/kemandirian dalam masyarakat yang dicapai dengan upaya sebagai berikut :

- a. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana ataupun iklim yang dapat membuat potensi atau kemampuan masyarakat berkembang.
- b. *Empowering*, yaitu memperkuat potensi atau kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.
- c. *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan untuk masyarakat yang menjadi subjek pengembangan.

Pemberdayaan akan berhasil jika masyarakat yang tadinya memiliki ketidakberdayaan menjadi berdaya, dengan memiliki kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Keberdayaan masyarakat inilah yang menjadi penyebab masyarakat dapat bertahan dalam mengembangkan dirinya supaya mereka dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan.

2.1.3 Indikator Keberdayaan

Menurut Suharto (2017 hlm 63-64) Untuk mengetahui fokus dan tujuan kapasitas secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator kemampuan yang dapat secara jelas menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial dilakukan, berbagai upaya dapat lebih difokuskan pada aspek tujuan perubahan (seperti keluarga miskin). Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada penguatan kapasitas ekonomi, kemampuan mencapai kesejahteraan, serta kapasitas budaya dan politik. Ketiga aspek ini terkait dengan empat dimensi kekuasaan, diantaranya sebagai

berikut : kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*), dan kekuasaan dengan (*power with*). Tabel dibawah ini merupakan tabel yang merangkum indikator-indikator keberdayaan.

Tabel 2.1
Indikator Keberdayaan

Jenis Hubungan Kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan mengakses Manfaat Kesejahteraan	Kemampuan Kultural dan Politis
Kekuasaan di dalam : Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya. • Keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara. • Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepercayaan diri dan kebahagiaan • Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara. • Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan oranglain. • Keinginan untuk mengontrol jumlah anak. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Assertiveness</i> dan otonomi • Keinginan untuk menghadapi subordinasi gender termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik • Keinginan terlibat dalam budaya, hukum, dan proses-proses budaya, hukum dan politik.
Kekuasaan	<ul style="list-style-type: none"> • Akses 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterampilan, 	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilitas dan

<p>untuk :</p> <p>Meningkatkan kemampuan individu untuk berubah; meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses</p>	<p>terhadap pelayanan keuangan mikro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akses terhadap pendapatan • Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga • Akses terhadap pasar • Penurunan beban dalam pekerjaan domestic, termasuk perawatan anak. 	<p>termasuk kemelekan huruf.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status kesehatan dan gizi. • Kesadaran mengenai kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. • Ketersediaan pelayanan kesejahteraan publik. 	<p>akses terhadap dunia diluar rumah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan mengenai proses hukum, politik, dan kebudayaan. • Kemampuan menghilangkan hambatan formal yang merintangi akses terhadap proses hukum, politik, dan kebudayaan.
<p>Kekuasaan atas :</p> <p>Perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya. • Kontrol atas 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga termasuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga

<p>pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro, kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut.</p>	<p>pendapatan aktivitas produktif keluarga yang lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrol atas asset produktif dan kepemilikan keluarga. • Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar. 	<p>keputusan keluarga berencana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat. 	<p>dan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum, dan politik.
<p>Kekuasaan dengan : Meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain, terutama dalam pekerjaan publik dan modern. • Mampu memberi gaji terhadap orang 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghargaan tinggi terhadap dan peningkatan pengeluaran untuk snggots keluarga. • Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis. • Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat.

kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro.	lain. • Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan diskriminasi gender pada konteks ekonomi makro.		• Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi gender yang bersifat kultural, politis, hukum pada tingkat masyarakat dan makro.
--	---	--	---

Sumber : (Suharto, 2017 hal 65)

Untuk gambaran singkat mengenai tabel indikator keberdayaan di atas menurut Suharto, (2017 hlm 66) adalah sebagai berikut :

- a. Kebebasan mobilitas merupakan kemampuan individu untuk meninggalkan rumah atau area tempat tinggal individu tersebut. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu tersebut dapat berjalan sendiri.
- b. Kemampuan untuk membeli barang-barang konsumsi kecil, artinya kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti kebutuhan primer/dasar (beras, minyak, sabun mandi, dll). dengan izin pasangan, apalagi jika uang yang digunakannya adalah milik sendiri..
- c. Kemampuan untuk membeli barang-barang besar, merupakan kemampuan seseorang untuk membeli barang-barang sekunder/tersier, (seperti lemari pakaian, televisi., radio,dll). Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi akan diberikan kepada mereka yang dapat membuat keputusan sendiri

terutama dengan uang mereka sendiri, tanpa izin pasangannya, apalagi dengan menggunakan uangnya sendiri.

- d. Terlibat dalam keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan sendiri ataupun bersama suami/istri pada keputusan anggota keluarga, misalnya renovasi rumah, keputusan pembelian, pergi untuk bisnis, dan lain-lain.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga : responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir memiliki seorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang membawa uang, tanah, serta perhiasan tanpa izinnnya, melarang memiliki seorang anak, dan melarang bekerja di luar rumah.
- f. Kesadaran hukum dan politik: mengenal salah satu pegawai pemerintahan desa/kelurahan, salah satu anggota DPRD setempat, mengetahui nama presiden, memahami bagaimana pentingnya surat nikah, dan mengerti tentang hukum-hukum hak waris.
- g. Partisipasi dalam sebuah kampanye dan protes: jika seorang suami terlibat dalam kampanye atau protes dengan oranglain, misalnya jika seorang suami membunuh istrinya dan memukul seorang wanita, orang itu dianggap berdaya, menyalahgunakan bantuan sosial dan lain-lain.
- h. Ketahanan ekonomi dan kontribusi keluarga: memiliki rumah, tanah, properti produktif, dan tabungan. Seseorang dianggap memiliki titik tinggi ketika dia hanya memiliki aspek-aspek ini (jauh dari pasangannya).

2.1.4 Tahap-tahap pemberdayaan Masyarakat

Menurut Ambar Teguh dalam Sarjito (2013 hlm 18) tahap-tahap yang harus dihadapi pemberdayaan masyarakat yaitu : (a) tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, (b) tahap transformasi kemampuan yaitu pengembangan wawasan dan keterampilan untuk berperan dalam sebuah pembangunan, (c) tahap mengembangkan kemampuan intelektual terkait inisiatif/inovasi untuk menjadi mandiri.

Sedangkan menurut Soekanto dalam Muchlisin (2017) ada 7 tahapan pemberdayaan masyarakat yaitu :

- a. Tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ada 2 tahap yang perlu dilakukan yaitu: 1) penempatan petugas (staf pemberdayaan masyarakat), dan 2) penyiapan lapangan.
 - b. Tahap pengkajian (*assessment*). Dalam tahapan ini pengkajian bisa dilaksanakan secara individual melalui kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Pada tahap ini kita perlu mengidentifikasi apa yang dibutuhkan sesuai dengan sumberdaya yang ada untuk komunitas yang diberdayakan.
 - c. Tahap perencanaan program atau kegiatan alternatif. Pada fase ini para eksekutif bertindak sebagai fasilitator perubahan yang melibatkan masyarakat secara partisipatif dan mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi dan mencari solusi bagaimana menyelesaikannya.
 - d. Tahap pemformalisasi rencana aksi. Selama fase ini agent perubahan membantu setiap kelompok mengembangkan dan menentukan program dan kegiatan yang akan diterapkan untuk menyelesaikan masalah secara langsung.
 - e. Tahap realisasi (pelaksanaan) suatu program atau kegiatan. Untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat sebagai pelaksana diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang dikembangkan. Kolaborasi antara pemimpin pemberdayaan dan masyarakat penting pada tahap ini, karena hal-hal yang direncanakan dengan baik dapat menyimpang dari kenyataan.
 - f. Tahap evaluasi. Evaluasi merupakan proses pemantauan oleh warga dan staf terhadap program pemberdayaan yang sedang berlangsung, dan fase ini harus dilakukan dengan partisipasi anggota masyarakat. Dengan partisipasi warga, perlu dibentuk komunitas untuk audit internal dalam jangka pendek dan membangun komunitas mandiri dimana sumber daya yang ada dapat dikembangkan dan digunakan dalam jangka panjang.
- Menurut Suharto (2017 hlm 80) Evaluasi dapat dilakukan kalau rencana program sudah dilaksanakan. Evaluasi membuat perencanaan menjadi proses yang berkelanjutan. Selain itu sebenarnya evaluasi saling

berhubungan dengan monitoring. Menurut Humas (2015) monitoring adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan yang dilaksanakan.

Menurut Mustofa (2012 hlm 18) ada beberapa alasan mengapa suatu program perlu di monitoring dan di evaluasi diantaranya: (1) para pengelola program dan pemangku kepentingan perlu mengetahui seberapa baik pelaksanaan program telah mencapai tujuannya pada dampak yang diharapkan. (2) monitoring dan evaluasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sumber daya program. (3) informasi yang dikumpulkan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi memberikan dasar yang lebih jelas untuk pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan dan pengembangan program di masa mendatang. (4) perencanaan dan pengembangan program ke depannya hanya dapat ditingkatkan jika didasarkan pada pengalaman dalam pelaksanaan program.

- g. Tahap terminasi. fase ini merupakan fase pemisahan formal dari komunitas sasaran. Pada fase ini, proyek/program akan segera dibatalkan.

2.1.5 Sasaran Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Choironi (2018 hlm 43-44) masyarakat yang perlu diberdayakan secara umum adalah : (1) mereka yang belum mandiri, (2) mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang buruk, (3) mereka yang memiliki pekerjaan namun tidak mencukupi segala kebutuhan dirinya sendiri dan keluarga.

Adapun menurut Suharto dalam Sarjito (2013 hlm 17) menyatakan bahwa ada beberapa kelompok yang masuk dalam kategori kelompok lemah dan tidak berdaya yang termasuk dalam sasaran pemberdayaan diantaranya : (1) kelompok yang lemah secara structural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis. (2) kelompok rentan, seperti orang yang lanjut usia, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, dan komunitas terpencil. (3) kelompok rentan secara pribadi (yaitu orang-orang yang memiliki masalah pribadi dan atau keluarga).

2.1.6 Prinsip Pemberdayaan

Menurut Anwas (2019 hlm 58-60) pemberdayaan harus membantu meningkatkan kualitas hidup subjek, berdaya saing dan mandiri. Dalam melakukan pemberdayaan, pelaku pemberdayaan harus berpegang pada prinsip-prinsip pemberdayaan.

Berkaitan dengan hakikat dan konsep pemberdayaan, kita dapat mengidentifikasi beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat, antara lain :

- a. Pemberdayaan dilakukan secara demokratis serta menghindari unsur paksaan. Semua individu memiliki hak yang sama untuk diberdayakan.
- b. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi tujuan.
- c. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau subjek kegiatan pemberdayaan.
- d. Singkatnya Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai-nilai, budaya, dan kearifan daerah yang memiliki nilai luhur di dalam masyarakat.
- e. Pemberdayaan merupakan proses yang memakan waktu, sehingga merupakan proses yang bertahap dan berkesinambungan.
- f. Kegiatan pendampingan atau *coaching* perlu dilakukan secara cerdas, bertahap, dan berkesinambungan.
- g. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari satu sisi. Ia harus holistic dalam setiap aspek kehidupan sosial.
- h. Perempuan khususnya remaja dan ibu muda perlu diberdayakan karena memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan.
- i. Pemberdayaan dilakukan untuk membantu masyarakat terus belajar dan mengembangkan kebiasaan belajar sepanjang hayat (*lifelong learning / life long education*).
- j. Pemberdayaan perlu memperhatikan keragaman budaya. Oleh karena itu, diperlukan metode dan pendekatan yang berbeda sesuai dengan situasi di lapangan.

- k. Pemberdayaan bertujuan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat.
- l. Tujuan pemberdayaan harus dipromosikan oleh kewirausahaan dalam persiapan untuk wirausaha.
- m. Agen pemberdayaan perlu memiliki keterampilan (kompetensi) yang cukup, dinamisme, fleksibilitas perilaku, dan kemampuan yang memadai untuk mengikuti tuntutan zaman dan masyarakat. Agen pemberdayaan bertindak sebagai fasilitator.
- n. Pemberdayaan membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang ada dan terhubung di masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, LSM, dan anggota masyarakat lainnya. Setiap orang yang terlibat dilibatkan sesuai dengan peran, potensi, dan keterampilannya.

Dalam perspektif pekerjaan sosial menurut Suharto (2017 hlm 68-69) prinsip pemberdayaan diantaranya :

- a. Pemberdayaan merupakan proses kolaboratif, karena pemberdaya dengan yang diberdayakan perlu bersinergi sebagai mitra.
- b. Masyarakat harus bisa melihat diri mereka sebagai seseorang yang mampu membuat atau mempengaruhi perubahan.
- c. Masyarakat harus berpartisipasi dalam proses perencanaan, dan pelaksanaan pemberdayaan mereka sendiri.
- d. Proses pemberdayaan memiliki sifat dinamis, sinergis, sesuai dengan perubahan, evolutif, dan memiliki berbagai macam solusi.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka Schwartz dalam Suharto (2017 hlm 69-70) mengusulkan 5 tugas yang dapat dilaksanakan pekerja sosial diantaranya :

- a. Carilah kesamaan mendasar antara persepsi orang tentang kebutuhan mereka dan masalah sosial yang mereka hadapi.
- b. Mengenali dan mengelola kesulitan yang menghalangi banyak orang dan menggagalkan upaya mereka untuk mengidentifikasi kepentingan mereka dan kepentingan yang mempengaruhi mereka.

- c. Memberikan data tentang ide, fakta, nilai, dan konsep yang tidak dimiliki orang tetapi dapat membantu mengatasi realitas sosial dan masalah yang mereka hadapi.
- d. Singkatnya, berbagi visi, harapan dan aspirasi pekerja sosial dengan masyarakat adalah investasi dalam interaksi antara manusia dan masyarakat, dan kesejahteraan individu dan masyarakat.
- e. Mendefinisikan kondisi dan batas situasi di mana sistem hubungan pekerja sosial-sosial terbentuk. Aturan-aturan ini memberikan latar belakang bagi “kontrak kerja” yang mengikat masyarakat dan institusi. Batas-batas ini juga dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat dan pekerja sosial untuk memenuhi tanggung jawab mereka.

2.1.7 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Anwas (2019 hlm 87) pemberdayaan bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat agar dapat berdaya dan mandiri dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Akan tetapi agar berhasil kita perlu menekankan masalah masyarakat dan hasil serta proses yang bergantung pada masalah dan kebutuhan masyarakat agar partisipasi dari masyarakat tinggi. Untuk meraih keberhasilan dalam pelaksanaan pemberdayaan maka bisa didapatkan dengan menerapkan pendekatan *bottom-up*, dengan menyelidiki potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menjadi dasar bagi pelaku pemberdayaan untuk menetapkan rencana pemberdayaan (tujuan, materi, metode, alat, evaluasi) yang dikembangkan bersama masyarakat sasaran. Melibatkan kelompok sasaran merupakan salah satu cara untuk mengajak kelompok sasaran berpartisipasi aktif dalam proses pemberdayaan.

Dalam melaksanakan program pemberdayaan maka harus dilaksanakan dengan menerapkan berbagai macam pendekatan. Menurut Suharto (2017 hlm 67-68) penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu :

- a. Pemungkinan: Menciptakan suasana atau iklim di mana potensi masyarakat dapat dikembangkan secara optimal. Menurut Soleh (2017 hlm 51) Pengembangan potensi bertujuan untuk mendorong terwujudnya

kemandirian melalui pengembangan potensi unggulan dan penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat. dalam upaya pengembangan potensi perlu memberdayakan partisipasi masyarakat. Pemberdayaan juga harus mampu membebaskan masyarakat dari hambatan kultural dan struktural yang menghambatnya.

Pemungkinan ini dapat dilakukan dengan diadakannya kegiatan observasi yang berguna untuk mengetahui potensi masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. setelah itu baru pelaksana merancang program yang sesuai dan memberitahukannya kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Menurut Mardatila (2020) sosialisasi dalam arti sempit adalah proses memperkenalkan suatu program atau kegiatan kepada seseorang dan melihat bagaimana orang tersebut menentukan tindakan dan reaksinya.

- b. Penguatan: Memperkuat pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka. Pemberdayaan harus mampu mengembangkan dan mengembangkan seluruh keterampilan dan rasa percaya diri masyarakat yang mendukung kemandirian masyarakat. Menurut teori Skinner dalam Anggraini (2014), penguatan memegang peranan penting dalam proses pembelajaran.

Menurut Muchlisin (2021), penguatan adalah reaksi positif yang ditujukan untuk memberikan informasi atau umpan balik, memperkuat dan menegaskan hal-hal tertentu, dan dianggap sebagai tindakan dorongan atau koreksi. Mempertahankan atau meningkatkan perilaku yang baik.

Menurut Usman dalam Muchlisin (2021), penguatan adalah segala bentuk tanggapan, baik linguistik maupun nonverbal, di mana tindakan guru ditujukan untuk memberikan informasi atau umpan balik kepada penerima yang merupakan bagian dari perubahan atau perbaikan perilaku. Karena tindakannya memberikan dorongan atau koreksi.

Penguatan dapat mencakup penguatan pengetahuan, penguatan sikap, dan pembiayaan. Menurut Makhmudah (2018 hlm 203) Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan

panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan, dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak.

Menurut Suharto (2017 hlm 58) pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan berbagai keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Prihatminingtyas (2019) Modal berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan, dimana modal sehari-hari berupa uang yang digunakan sebagai modal awal membantu pedagang berjualan untuk membeli keperluan berdagang. Modal diperoleh dari pemilik usaha sendiri. Modal sendiri jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung pada pemilik usaha itu sendiri.

- c. Perlindungan: Melindungi masyarakat, terutama kelompok lemah, dari penindasan oleh kelompok kuat, mencegah persaingan yang tidak seimbang (terutama tidak sehat) antara kelompok kuat dan lemah, dan mencegah eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan kontrol yang tidak menguntungkan masyarakat miskin. Perlindungan bisa dilakukan dengan adanya pembentukan kelompok dan kerjasama.

Menurut Alfari (2022) Faktor yang mempengaruhi pembentukan kelompok diantaranya: (1) Kesamaan Genealogi (keturunan atau ikatan darah), (2) Kesamaan Geografis (berdasarkan wilayah tempat tinggal saat ini, dan berdasarkan wilayah asal), (3) Kesamaan Kepentingan (merujuk pada kesamaan hobi dan pekerjaan), dan (4) Kesamaan Keyakinan atau Agama (kelompok gabungan dari agama yang sama untuk mempermudah aktivitas ibadah).

Menurut Tenner dan Detoro dalam Lawasi (2017) Kerjasama tim adalah sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama dan tujuan tersebut akan lebih mudah diperoleh dengan kerjasama tim dari pada dilakukan sendiri.

- d. Penyokongan: Memberikan bimbingan dan dukungan agar orang dapat memenuhi peran dan tujuan mereka dalam hidup. Pemberdayaan harus mampu menopang masyarakat agar tidak semakin lemah dan tertinggal. Penyokongan disini bisa juga dilakukan dengan memberikan sebuah motivasi.

Menurut Omollo dan Purnami (2019) motivasi berdampak positif terhadap produktivitas kerja karyawan apabila kompensasi yang diterima sesuai dengan beban kerja. Sedangkan menurut Basleman dan Mappa (2011 hlm 34) motivasi yaitu keadaan seseorang yang mendorongnya untuk melakukan tindakan dalam kegiatan untuk mencapai tujuannya.

- e. Pemeliharaan: Memelihara kondisi yang membantu menjaga keseimbangan distribusi kekuasaan di antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus memastikan keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang untuk melakukan bisnis.

Strategi pemberdayaan hakikatnya merupakan gerakan yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat. pemberdayaan bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat yang tidak berdaya atau memiliki ketidakmampuan agar dapat beradaptasi, dan melakukan pembenahan dan penyempurnaan dengan mengembangkan kemampuan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, masalah yang ada, dan kebutuhannya.

Menurut Anwas (2019 hlm 90) menyatakan bahwa model dan strategi pemberdayaan tidak dapat disatukan dalam gerakan masyarakat. Menyesuaikan dengan kemungkinan, kebutuhan, dan permasalahan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, strategi penguatan masyarakat yang tepat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Dalam hal ini, pelaku pemberdayaan harus mampu mengembangkan program dan strategi pemberdayaan yang tepat dan efisien.

2.1.8 Padat Karya

Dalam indonesiabaik.id Padat karya merupakan kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Tujuan utama dari program padat karya adalah untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terutama masyarakat yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap.

Dalam dephub.go.id (2020) tujuan dari program padat karya yaitu untuk mengurangi pengangguran, dan masyarakat miskin; memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat; meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat; serta mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari program padat karya dalam republika.co.id (2021) adalah meningkatkan pendapatan khususnya bagi anggota kelompok, meningkatkan kualitas lingkungan, dan mobilitas warga, serta menumbuh kembangkan perekonomian di lokasi penerima program padat karya.

2.1.9 Jenis Kegiatan Padat Karya

Dalam djpk.kemenkeu.go.id Jenis kegiatan padat karya dapat dilakukan melalui :

1. Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana pedesaan. sesuai dengan daftar kewenangan Desa, antara lain: perbaikan alur sungai dan irigasi, pembangunan dan/atau perbaikan jalan dan jembatan skala Desa, serta tambatan perahu.
2. Pemanfaatan lahan tidur. Untuk meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. atau
3. Produktif lainnya. Yang memberikan nilai tambah kepada masyarakat dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumberdaya lokal yang ada dan sifatnya berkelanjutan.
4. Pemberdayaan masyarakat. antara lain: pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan pemukiman, pengembangan energi

terbarukan, penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan bagi anak (bayi dan balita).

2.1.10 Konsep Padat Karya

Untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan salah satunya yaitu kebijakan padat karya (*cash for work*). Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan pengupahan untuk program padat karya sebagai komitmen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan padat karya sebenarnya diperuntukkan kepada masyarakat yang tidak bisa bekerja dikarenakan ketidakmampuannya dalam berkompetisi mendapatkan pekerjaan yang menyebabkan mereka menjadi pengangguran.

Menurut Habibi dalam Ritonga (2019 hlm 5) pengembangan padat karya sangat tepat karena di Indonesia banyak sekali sumberdaya manusia yang tidak memiliki keterampilan. Salah satu bentuk dari pekerjaan padat karya adalah pekerjaan konstruksi perbaikan jalan, saluran, dan sebagainya. Sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

2.1.11 Padat Karya sebagai Solusi Lapangan Pekerjaan Masyarakat

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan padat karya sebagai (1) pekerjaan yang berasaskan pemanfaatan tenaga kerja yang tersedia dalam jumlah besar, (2) kegiatan pembangunan proyek yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan modal atau mesin. Kedua pengertian tersebut menitikberatkan pada adanya suatu pekerjaan yang dapat mengoptimalkan penggunaan sumberdaya manusia dalam kuantitas yang besar. Artinya, padat karya menciptakan suatu lapangan pekerjaan, baik itu baru maupun yang sifatnya perluasan yang membutuhkan potensi tenaga kerja yang ada sehingga tingkat pengangguran bisa berkurang.

Program padat karya melibatkan masyarakat dengan berbagai tingkat pendidikan yang belum merata. Dengan kata lain, ada resiko ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku karena adanya kurang-pahaman masyarakat terhadap regulasi tersebut. Oleh

karena itu, pengawasan pada tahap pelaksanaan ini menitikberatkan pada pembinaan terhadap sumberdaya manusia yang terlibat didalamnya baik melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan lainnya.

Menurut Ritonga (2019 hlm 11) Pengawasan terhadap ketetapan manfaat dimaksudkan untuk memastikan bahwa ketepatan sasaran dan pelaksanaan dari program padat karya dapat memberikan manfaat, bukan hanya dengan terbangunnya infrastruktur, namun juga dengan terbangunnya ekonomi masyarakat yang fundamental melalui penurunan jumlah penganggur dan meningkatnya produktivitas dan daya beli dari masyarakat desa.

Dengan adanya program padat karya yang efektif, diharapkan dapat menjadi solusi untuk menekan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Artinya dengan program padat karya masyarakat secara langsung dapat menerima uang tunai (upah) dari hasil kerja mereka. Skema padat karya (*cash for work*) merupakan salah satu bentuk kegiatan padat karya dengan memberikan upah kepada tenaga kerja yang terlibat (harian/mingguan) dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.12 Peningkatan Pendapatan/Ekonomi Keluarga

Menurut Sarjito (2013 hlm 27) ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai bidang studi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya individu, masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Ilmu ekonomi adalah ilmu tentang perilaku dan perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan yang beragam dan berkembang dengan menggunakan sumber daya yang tersedia melalui pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan/atau distribusi.

Menurut Iskandar dalam Sarjito (2013 hlm 27) Ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas, yaitu rumah tangga bangsa, negara, dan dunia.

Menurut Sarjito (2013 hlm 28) Ada beberapa indikator yang dapat menentukan keadaan keuangan suatu keluarga dalam suatu masyarakat, seperti tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, kondisi tempat tinggal, lingkungan, aset. Dimiliki oleh, berpartisipasi dalam kegiatan kelompok masyarakat.

Perekonomian keluarga merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang tujuannya untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga, baik berupa kebutuhan primer, maupun kebutuhan sekunder. Yang paling berhak menjadi pelaku ekonomi dalam sebuah keluarga yaitu laki-laki karena ia berperan sebagai seorang ayah, namun perempuan juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola perekonomian tersebut.

Pada masa ini perkembangan zaman yang sangat pesat dengan memasuki era globalisasi yang saat ini banyak menggunakan kecanggihan-kecanggihan alat digital menjadi salah satu hal yang mampu berpengaruh terhadap ekonomi seseorang/masyarakat, karena tidak semua masyarakat dapat menguasai alat digital terutama masyarakat desa. Hal itu disebabkan karena adanya ketidakmampuan dari masyarakat desa dalam mengikuti perkembangan dan kemajuan digital. Hal ini juga yang dapat menyebabkan masyarakat desa perlu diberdayakan agar dapat mengejar ketertinggalan yang dapat mempengaruhi perekonomiannya.

Meskipun pemberdayaan bukan merupakan konsep ekonomi, namun kegiatan pemberdayaan sering ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan upaya untuk membuat masyarakat sejahtera. Dengan adanya pemberdayaan, seorang petugas pemberdayaan harus mampu meningkatkan kualitas diri masyarakat sasaran agar mereka mampu menata masa depannya sendiri.

Menurut Anwas (2019 hlm 86) Pemberdayaan untuk menuntaskan kemiskinan bisa dilaksanakan dengan cara merubah pola pikir seseorang atau masyarakat sasaran untuk diberdayakan serta dimandirikan. Karena pada hakikatnya penyebab kemiskinan terkadang melekat pada diri individu/masyarakat tersebut. Masalah kemiskinan ini tentunya tergantung pada kualitas

SDM, oleh sebab itu dalam menuntaskan masalahnya perlu dilakukan kegiatan pemberdayaan.

Melalui kegiatan pemberdayaan, masyarakat sasaran disadarkan kepada potensi, kebutuhan, dan masalah yang ada pada dirinya dan lingkungannya agar mereka mau melakukan perubahan untuk menuntaskan masalah yang mereka hadapi. Pada akhirnya perubahan tersebut dapat dilihat dengan adanya perubahan perilaku individu atau masyarakat sasaran ke arah yang lebih baik, serta adanya peningkatan kualitas hidup mereka yang ditandai dengan terselesaikannya semua masalah mereka terutama dalam hal terpenuhinya segala kebutuhan mereka agar mereka dapat merasa sejahtera.

Untuk menjalankan sebuah program pemberdayaan tentunya diperlukan modal. Menurut Prihatminingthyas (2019) Modal berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan, menggunakan modal harian berupa uang sebagai modal awal untuk membantu pedagang menjual untuk membeli kebutuhan perdagangan. Modal tersebut diperoleh dari pemilik perusahaan itu sendiri. Ekuitas terbatas. Singkatnya, menaikkan jumlah tertentu sangat bergantung pada pemilik bisnis itu sendiri.

Dari adanya program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakn untuk membantu meningkatkan ekonomi/pendapatan keluarga biasanya akan menghasilkan beberapa hasil yang berupa output dan outcome. Menurut Lauren dalam BPPK Kemenkeu (2017) menyatakan bahwa output merupakan hasil langsung dari pendidikan dapat disebut juga hasil yang di raih dalam jangka pendek. Sedangkan outcome adalah efek jangka panjang pada proses pendidikan. Misalnya tambahan pendidikan, tambahan pelayanan dan pelatihan, kesempatan kerja, tambahan penghasilan dan penerimaan ketenaran.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

2.2.1 Penelitian yang dilaksanakan oleh Karmila et.al dengan judul *“Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Program Padat Karya Tunai di Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang”* yang diteliti pada tahun 2021. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa

pelaksanaan pemberdayaan yang dilaksanakan dilakukan melalui 3 tahap diantaranya : 1) *Tahap penyadaran*, meliputi pemberian sosialisasi mengenai program yang akan dilaksanakan, serta cara atau proses yang dilakukan dalam pelaksanaan program. Dalam tahap penyadaran ini masyarakat diberi pengetahuan dan wawasan mengenai pentingnya program padat karya tunai yang akan dilaksanakan karena dengan berjalannya program ini masyarakat yang tadinya tidak berdaya akan terberdayakan dan yang tadinya pengangguran akan memiliki pekerjaan dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan padat karya tunai sehingga pembangunan cepat terselesaikan. 2) *Tahap pengkapasitasan*, artinya memampukan masyarakat sehingga masyarakat desa merasa diberdayakan dengan memberikan hak dan kekuatan kepada mereka untuk melakukan segala kegiatan. Pengkapasitasan disini merupakan cara untuk melihat kapasitas masyarakat agar kedepannya mereka bisa berpartisipasi sepenuhnya dalam pelaksanaan padat karya tunai sebagai upaya untuk memberdayakan diri mereka sendiri. 3). *Tahap pendayaan*, tahap pendayaan diartikan sebagai peluang daya, kekuasaan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, masyarakat yang lebih peduli dan ikut berpartisipasi akan berpengaruh pada aspek ekonominya sendiri. Karmila et.al (2021)

2.2.2 Penelitian yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Program Padat Karya Pangan di Kecamatan Noemuti*” yang diteliti oleh Medan Yonathan Maela (2017). Adapun inti dari penelitian yang dilaksanakan ini adalah penanggualangan masalah sosial rawan pangan di kabupaten TTU dilakukan pemerintah lewat berbagai program, salah satunya adalah pemerintah menerapkan program Padat Karya Pangan (PKP). Dalam tataran pelaksanaan, program PKP belum sepenuhnya mencapai target baik mencakup tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran tentang perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program PKP di kecamatan Noemuti kabupaten TTU. Secara operasional ukuran yang digunakan untuk mengkaji kebijakan pemerintah dalam program PKP di kecamatan Noemuti meliputi perencanaan (*planning*), pelaksanaan atau implementasi, pengawasan, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program PKP yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten TTU belum maksimal sebab belum memberikan motivasi dan penyadaran bagi masyarakat akan pentingnya memahami hal-hal yang akan dilakukan berkaitan dengan pengelolaan PKP. Pada tahap pelaksanaan program PKP telah berjalan, namun belum secara efektif dan efisien, sehingga program PKP hingga tahun ketiga tidak memenuhi target luas lahan RTS-PM sebesar 75 are sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pelaksanaannya. Tahapan pengawasan padat karya pangan telah berjalan, namun hanya dilakukan tiga kali sehingga perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program tepat sasaran sesuai dengan target menuju pensiun petani. Evaluasi dari program PKP yang hanya berjalan atau dilaksanakan pada tingkat desa dan kelurahan diharapkan dapat dilakukan pada tingkat kabupaten sehingga dapat merealisasi masukan-masukan yang merupakan tindakan konkret sebagai lanjutan yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan. Yonathan (2017)

- 2.2.3 Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional*” yang diteliti pada 1 Juni 2022. Hasil dari penelitian ini mengacu pada teori Grindle yaitu meliputi aspek isi kebijakan dan konteks implementasi. Pada aspek isi kebijakan terdapat beberapa indikator diantaranya : 1) Indikator kepentingan yang dipengaruhi, Indikator ini dilihat dari peran pemerintah dan staff pegawai dalam pelaksanaan program, dimana pemerintah sebagai pelaksana program melalui informasi, penyuluhan-penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop yang dilakukan, dan pegawai sebagai sasaran program sedangkan masyarakat sebagai *outcome*. 2) Indikator tipe manfaat,

Pelaksanaan program dapat memberikan manfaat kepada pegawai, lingkungan kerja di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan dan bermanfaat juga bagi lingkungan masyarakat yaitu berupa menyediakan lapangan kerja bagi pengangguran, setengah pengangguran, serta keluarga miskin dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotongroyong, dan partisipasi masyarakat dalam kelompok.

3) Indikator derajat perubahan yang diharapkan, meliputi terselenggaranya program padat karya dalam meningkatkan pengetahuan pegawai tentang pelaksanaan padat karya, terselenggaranya pelaksanaan program dalam meningkatkan kemampuan pegawai untuk menolong dirinya sendiri dalam pekerjaan dan meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan daya beli masyarakat desa.

4) Indikator pelaksanaan program, pelaksanaan padat karya dilaksanakan dengan penyuluhan-penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop yang dilakukan oleh petugas yang ahli dibidangnya dan kegiatan padat karya menyerap tenaga kerja demi meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

5) Indikator sumberdaya yang dilibatkan, terdiri dari pemerintah, pegawai, dan dari masyarakat terutama tenaga kerja lokal desa yang berasal dari desa setempat serta sarana dan prasarana. Aspek selanjutnya yaitu aspek konteks implementasi. Aspek ini dilihat dari

1) Indikator kekuasaan kepentingan dan strategi, dalam padat karya ini memiliki strategi yang efektif dari cara-cara yang dilakukan pemerintah sehingga pegawai mau mengikuti saran yang telah dianjurkan tanpa paksaan. Strategi tersebut dilakukan dengan penyuluhan yang efektif dan pemahaman yang berarti sehingga pegawai mampu untuk mengikuti program tercapainya pengetahuan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2) Indikator karakteristik lembaga dan penguasa, pemerintah mempunyai sikap yang baik kepada pegawai dengan memberikan informasi dan penyuluhan yang bermanfaat, tanpa memaksa dan member pengertian-pengertian dengan cara yang baik sehingga pegawai mampu mengerjakan

dengan baik. 3) Indikator kepatuhan dan daya tanggap, pegawai cukup patuh terhadap pelaksanaan program dan mempunyai daya tanggap yang cukup baik untuk melaksanakan program. Yuliana (2022)

- 2.2.4 Penelitian yang berjudul “*Strategi Pelaksanaan Program Padat Karya Pangan dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Timor Tengah Utara*” yang diteliti oleh Stefanus Bekun et.al pada tahun 2013. Inti dari penelitian ini yaitu masyarakat Timor Tengah Utara yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, memiliki kemampuan dan keterampilan terbatas dalam mengelola lahan pertanian. Dengan kemampuan yang dimiliki tersebut, berjuan untuk keluar dari masalah-masalah yang dihadapi yaitu kemiskinan, yang disebabkan karena kerawanan pangan dan persoalan-persoalan lainnya. Untuk menekan persoalan tersebut, pemerintah mengoptimalkan bidang pertanian dengan memfokuskan pada program padat karya pangan sebagai jalan utama memberdayakan petani. Program padat karya pangan sebagai upaya maksimal mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan beras miskin dengan cara member bobot lebih melalui pengorganisasian keluarga tani, kerja gotong royong mengelola lahan pertanian untuk memperkuat kerjasama menuju ketahanan pangan. Tetapi dalam pelaksanaannya, terkendala dengan perubahan iklim yang tidak menentu, lahan yang kritis, praktek bertani yang tradisional, pelaksanaan program padat karya pangan yang belum searah dan Penyuluh Pertanian Lapangan belum bertugas maksimal di desa. Dari persoalan ini, strategi pendekatan pemberdayaan menjadi penting untuk meningkatkan kemampuan bertani masyarakat. dan strategi pendekatan yang dimaksud yakni pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, yang merupakan strategi yang sangat penting dalam meningkatkan program padat karya pangan di kabupaten Timor Tengah Utara. Bekun (2013)
- 2.2.5 Penelitian yang berjudul “*Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Purbalinggo*” yang diteliti oleh Irfan Sofi tahun 2020. Adapun kesimpulan

dari penelitian ini yaitu pelaksanaan PKT Dana Desa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat miskin dengan minimal 55 tenaga kerja yang bisa terserap dalam setiap kegiatan. Rata-rata pemenuhan HOK 30% telah dilakukan oleh Desa melalui refocusing atau perubahan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) kegiatan. Adapun beberapa masukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PKT Dana Desa, pertama Pemerintah perlu mempertahankan program PKT Dana Desa ini karena sangat bermanfaat untuk masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan secara langsung khususnya yang menganggur atau setengah menganggur. Kedua, kedepan batasan HOK 30% tidak lagi menjadi patokan dan memberikan kebebasan kepada Desa untuk menggunakan Dana Desa dengan menggunakan metode swakelola. Sofi (2020)

Berdasarkan semua hasil penelitian yang relevan tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat melalui Pola Usaha Padat Karya untuk Membantu Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi pada Ibu Rumah Tangga Pengolah Singkong di Desa Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis) yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan proses pemberdayaan tersebut, serta untuk mengetahui bagaimana hasil yang didapatkan dengan adanya program pemberdayaan masyarakat tersebut.

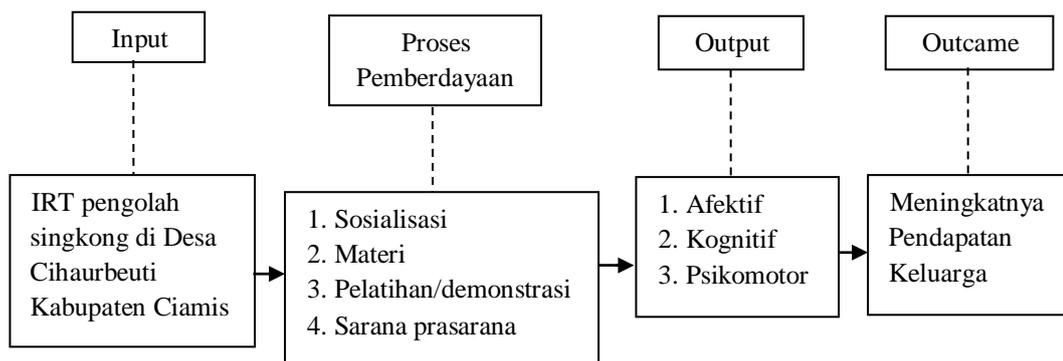
2.3 Kerangka Konseptual

Mata pencaharian penduduk Indonesia pada umumnya terdapat di sektor agraris, yaitu dalam bidang pertanian, sehingga banyak dari masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai buruh tani. Di daerah pedesaan masyarakat cenderung bekerja sebagai buruh tani karena mereka terpaksa sebab tidak ada lagi pekerjaan lain. Pekerjaan buruh tani ini tidak dapat dilakukan setiap hari melainkan hanya dapat dilakukan di musim panen saja, sedangkan di luar musim panen mereka hanya menjadi buruh harian lepas (bekerja dihari tertentu jika ada yang menyuruh atau membutuhkan tenaganya).

Berdasarkan hal tersebut maka mengakibatkan para Ibu Rumah Tangga (IRT) tidak dapat mengandalkan pendapatan suaminya untuk memenuhi segala kebutuhan keluarganya dan jauh dari kesejahteraan keluarga. Dalam upaya mengatasi hal tersebut maka dilakukan program pemberdayaan masyarakat melalui pola usaha padat karya yang dilaksanakan oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) di Desa Cihaurbeuti yang tidak memiliki kegiatan di siang hari.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuatan kepada masyarakat sasaran agar mereka dapat menemukan masalah serta menemukan solusi untuk masalah yang sedang mereka hadapi. Pemberdayaan ini dilakukan untuk dapat mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang pendidikan, keterampilan, sikap, maupun ekonomi.

Kegiatan yang ada di Desa Cihaurbeuti memiliki tujuan yaitu untuk memberdayakan anggotanya, serta bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dengan memberikan pelatihan untuk mengolah singkong menjadi keripik kaca, yang kemudian dapat diaplikasikan melalui kegiatan produksi atau wirausaha. Kegiatan wirausaha ini dilakukan setiap hari dengan waktu yang fleksibel. Melalui kegiatan tersebut diharapkan bisa membantu meningkatkan pendapatan anggotanya sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga mereka agar dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

2.4 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka bisa diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui pola usaha padat karya yang dilakukan?
- b. Bagaimana hasil dari adanya program pemberdayaan masyarakat melalui pola usaha padat karya tersebut?